

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, isu akan keberlanjutan (*sustainability*) dan juga transparansi terkait perusahaan pada berbagai sektor menjadi perhatian utama di tingkat baik nasional maupun global. Perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri, serta tuntutan dari masyarakat terhadap praktik bisnis yang telah mendorong perusahaan dari berbagai sektor untuk menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Eka Sari & Sarda, 2024).

Menurut data dari *Global Reporting Initiative* bahwasannya sebanyak 78 % perusahaan dengan skala besar di dunia kini telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) sebagai salah satu bentuk transparansi, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik. Dengan peningkatan sebesar 15% dari tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan tren menuju transparansi *Environmental, Social, and Governance* (ESG). (Global Reporting Initiative, 2024).

Pada lingkup nasional, Indonesia sebagai negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, sangat bergantung pada sektor energi dan pertambangan sebagai penopang utama pada sektor perekonomian. Berdasarkan hasil dari (Badan Pusat Statistik, 2023) mencatat bahwa sektor pertambangan dan penggalan menyumbang 7% sampai 9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2022-2023. Tercatat pada tahun 2022 (Rp

1.546,3 triliun dari total PDB Rp 19.588,4 triliun) dan meningkat menjadi 8.49% pada tahun 2023 (Rp 1.774,5 triliun dari total PDB Rp 20.892,4 triliun).

Tabel 1. 1 Tabel Data Kontribusi Sektor Energi, Pertambangan dan Penggalian terhadap PDB Indonesia

Tahun	Nilai PDB Nasional (Triliun Rp, ADHB)	Nilai PDB Pertambangan & Penggalian (Triliun Rp)	Persentase Kontribusi
2022	19.588,4	1.546,3	7,89%
2023	20.892,4	1.774,5	8,49%

Sumber BPS (2024). *Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (ADHB), 2019–2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dengan penyumbang kontribusinya yang besar, Pemerintah Indonesia bergerak menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan seperti pada target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021). Komitmen dari pemerintah Indonesia ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pada Peraturan Nomor. 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017) yang mana peraturan ini mewajibkan perusahaan publik mampu dan dituntut untuk dapat menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). (Utama & Miranti, 2020)

Regulasi terkait laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) telah diterapkan, namun kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) di Indonesia pada sektor energi dan pertambangan masih rendah dan bervariasi. Tingkat pengungkapan *Sustainability report* disektor energi hanya mencapai

41,45% pada tahun 2021, ini tentunya masih jauh dari harapan regulator dan juga pemangku kepentingan yang ada. (Rakhmawati & Rahmasari, 2024)

Meskipun sektor energi dan pertambangan memiliki peran yang sangat strategis, sektor energi dan pertambangan juga sangat rentan terhadap perubahan dan gejolak komoditas global, ketidakpastian akan kebijakan dan juga biaya operasional yang tinggi. Pada kondisi yang seperti ini dapat dengan cepat membawa perusahaan ke dalam kondisi *Financial Distress*, yaitu kondisi ketika perusahaan mengalami keterbatasan akan finansial yang cukup berat sehingga hal ini akan berpotensi perusahaan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya (I. Harymawan et al., 2021)

Perusahaan yang dalam keadaan mengalami *Financial Distress* cenderung mengalami keterbatasan untuk dapat melakukan pengungkapan yang berkualitas, sehingga nantinya kualitas laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menurun. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan juga akuntabilitas perusahaan, yang tentunya akan mempengaruhi risiko reputasi dan kepercayaan investor (I. Harymawan et al., 2021).

Pada kondisi krisis keuangan, pihak dari manajemen kerap kali menghadapi pilihan yang sulit terkait dari pengalokasian sumber daya yang terbatas, antara mempertahankan dan dialokasikan untuk mendorong program keberlanjutan atau difokuskan pada upaya kelangsungan operasional jangka pendek. Hal yang kemudian menjadi dipertanyakan adalah apakah perusahaan tetap berkomitmen pada transparansi pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

atau mengurangi ketika profitabilitas mengalami tekanan (I. Harymawan et al., 2021).

Terdapat kekhawatiran dalam pengimplementasiannya, bahwa kualitas dari laporan keuangan keberlanjutan dapat menurun ketika suatu perusahaan menghadapi kondisi *Financial Distress*. Penurunan ini dapat terlihat dari berkurangnya cakupan isu yang diungkapkan, minimnya kedalaman dari informasi, hingga ketidakpatuhan terhadap standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI). Fenomena ini dipicu oleh strategi manajemen yang berusaha mengalihkan perhatian *stakeholder* dari kinerja keuangan yang memburuk. Pada saat yang sama investor serta pemangku kepentingan justru memerlukan informasi yang kredibel untuk menilai dan mengevaluasi resiliensi dan prospek jangka panjang Perusahaan (Utama & Miranti, 2020)

Dalam kondisi terjadinya situasi *Financial Distress*, perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang dapat meningkatkan potensi adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Tekanan tersebut mendorong manajemen untuk bertindak lebih oportunistik (Mahdavi et al., 2017). Dalam situasi ini, *Corporate Governance* dipandang memiliki peran penting sebagai variabel pemoderasi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang tercermin melalui kepemilikan institusional, keberadaan dewan komisaris independen, serta fungsi komite audit, diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian manajemen. Mekanisme tersebut berfungsi untuk menekan perilaku oportunistik dan mendorong manajemen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, meskipun

perusahaan berada dalam kondisi *Financial Distress*, penerapan *Corporate Governance* yang efektif dapat menjaga kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report Disclosure Quality*) agar tetap transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Daniri, 2016).

Tinjauan dari beberapa kajian literatur menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait hubungan antara *Financial Distress* dan pengungkapan keberlanjutan. pengaruh negative signifikan *Financial Distress* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur (Puspitasari Nurma, 2023). Temuan serupa juga ditemukan pada studi literatur lain yang menemukan bahwa *Corporate Governance*, seperti indikator keberadaan komisaris independen dan ukuran dewan dapat mempengaruhi tingkat dari *Financial Distress* serta kualitas dari pengungkapan laporan, namun hasilnya tidak selalu konsisten (Debora & Zoraya, 2025). Bahwasannya ukuran dari suatu perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report Disclosure Quality*) (Sasmita et al., 2022) .

Berdasarkan penelitian yang serupa juga mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* belum terbukti secara konsisten dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. (Mandagie et al., 2024). Beberapa keterbatasan penelitian terdahulu dapat diidentifikasi adalah masih terbatasnya kajian komprehensif terkait menguji peran *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Financial Distress* dan pengungkapan laporan keuangan keberlanjutan, khususnya pada sektor energi dan pertambangan di Indonesia. *Corporate Governance* dipandang relevan

sebagai variabel moderasi karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian manajerial yang mampu menekan perilaku oportunistik manajemen ketika perusahaan berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya akibat tekanan keuangan, sehingga dapat memengaruhi keputusan dan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang telah dilakukan sebagian besarnya langsung menyoroti pengaruh secara langsung dari *Financial Distress* ataupun *Corporate Governance* secara terpisah, tanpa mempertimbangkan interaksi yang dapat terjadi antar keduanya

Sebagian besar studi menggunakan data yang terbatas dan belum mengakomodasi dinamika terbaru pasca terjadinya implementasi regulasi laporan keberlanjutan (Rakhmawati & Rahmasari, 2024). Peran dari *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini masih relative terbatas dalam kajian secara empiris. Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun dan mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan. Regulasi ini menandai perubahan penting dalam praktik pelaporan perusahaan di Indonesia, khususnya bagi sektor dengan dampak lingkungan dan sosial yang tinggi seperti energi dan pertambangan.

Penelitian terdahulu juga sering kali hanya menggunakan *sustainability report* sebagai satu-satunya sumber data *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Padahal, meskipun regulasi telah mewajibkan pengungkapan laporan keberlanjutan, tidak seluruh perusahaan secara konsisten mempublikasikan laporan tersebut dalam periode pengamatan tertentu, sehingga data yang tersedia menjadi

terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor internal perusahaan, khususnya *Corporate Governance*, berperan dalam menjaga kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan di tengah tekanan *Financial Distress*.

Perusahaan yang menghadapi banyak tekanan keuangan cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dan mempertahankan kinerja pendek disbanding menjaga transparansi publik. Kondisi ini dapat menyebabkan pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi mengarah pada praktik *greenwashing* untuk menjaga citra positif di hadapan investor dan pemangku kepentingan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana tekanan keuangan dapat memengaruhi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report Disclosure Quality*), terutama di tengah meningkatnya tuntutan akan transparansi ESG di pasar modal Indonesia (Sutopo et al., 2018).

Peran tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi krusial dalam konteks ini, karena mekanisme pengawasan yang kuat diyakini mampu meminimalkan dampak negatif *Financial Distress* terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Keberadaan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional dapat menekan manajemen agar tetap mempertahankan transparansi meskipun berada dalam tekanan finansial. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana *Corporate Governance* berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara *Financial Distress* dan *Sustainability Report Disclosure Quality*.

Penting untuk dipahami bahwa saat terjadinya kondisi *Financial Distress* ini tidak selalu menghasilkan dampak yang sama terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* pada setiap perusahaan. Perbedaan respons dari setiap perusahaan terhadap adanya kondisi tekanan keuangan menunjukkan bahwa terdapat mekanisme internal yang mempengaruhi bagaimana dan adanya keterbatasan sumber daya yang disampaikan dalam kebijakan pelaporan. *Corporate Governance* dipandang relevan karena berfungsi sebagai system pengawasan dan pengendalian yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam bagaimana menentukan prioritas alokasi sumber daya dan tingkat transparansi perusahaan. *Corporate Governance* berperan sebagai mekanisme yang mengendalikan respons perusahaan terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu, *Corporate Governance* lebih tepat diposisikan sebagai variabel moderasi yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure Quality*.

1.2. Identifikasi Masalah

Pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah terbatasnya pemahaman tentang peran moderasi *Corporate Governance* dalam hubungan antara *Financial Distress* terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report Disclosure Quality*). Penelitian ini menawarkan beberapa hal untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan *Corporate Governance*. Dengan demikian, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan *Corporate Governance* pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023 ?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure Quality* secara simultan pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023 ?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* secara simultan pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023 ?
4. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* secara parsial pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023 ?
5. Bagaimana pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* memoderasi hubungan antara *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure Quality* pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui bagaimana kondisi *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023.
2. Mengetahui adanya keterkaitan antara *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023.
3. Mengetahui pengaruh *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* secara simultan pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023.
4. Mengetahui pengaruh *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* secara parsial pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023.
5. Mengetahui bagaimana pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure Quality* pada perusahaan publik sektor energi

dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi pengetahuan mengenai hubungan antara *Financial Distress*, *Sustainability Report Disclosure Quality* dan Mekanisme *Corporate Governance* khususnya pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia. Selain itu, hasil yang ditemukan dalam studi ini dapat menjadi acuan dan landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan khususnya pada sektor energi dan pertambangan untuk meningkatkan *Sustainability Report Disclosure Quality*., terutama dalam kondisi *Financial Distress*, dengan memperkuat praktik Mekanisme *Corporate Governance*. Mendorong transparansi dan juga akuntabilitas pengungkapan berkelanjutan serta memperkuat tata kelola dari perusahaan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada perusahaan publik sektor energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan data yang diperoleh secara sekunder melalui situs resmi (www.idx.co.id).

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 11 perusahaan publik sektor energi dan pertambangan di Indonesia dalam rentang waktu 2018-2023 yang diambil dari laporan keuangan dan *annual report* serta laporan keberlanjutan Perusahaan dapat diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) serta website resmi dari masing-masing perusahaan.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2025 – Juni 2026 (Jadwal Penelitian terlampir pada lampiran 01, halaman 140)